



APBN 2019: Sehat, Adil dan Mandiri Untuk Mendorong Investasi dan Daya Saing Indonesia Melalui Pembangunan Sumber Daya Manusia

Jakarta, 31 Oktober 2018 – Dalam Rapat Paripurna hari ini, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia resmi mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2019 menjadi undang-undang. APBN 2019 bertujuan untuk mendukung investasi dan daya saing Indonesia dengan fokus pada pembangunan sumber daya manusia. Tema besar APBN 2019 adalah “Sehat, Adil, dan Mandiri”. Sehat artinya APBN memiliki defisit yang semakin rendah dan keseimbangan primer menuju positif. Adil karena APBN digunakan sebagai instrumen kebijakan meraih keadilan, menurunkan tingkat kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, dan mengatasi disparitas antarkelompok pendapatan dan antarwilayah. Dari sisi kemandirian, APBN 2019 dapat dilihat dari penerimaan perpajakan yang tumbuh signifikan sehingga memberikan kontribusi dominan terhadap pendapatan negara serta mengurangi kebutuhan pembiayaan yang bersumber dari utang. Dengan APBN yang Sehat, Adil dan Mandiri diharapkan kebijakan fiskal akan mampu merespon dinamika volatilitas global, menjawab tantangan dan mendukung pencapaian target-target pembangunan secara optimal.

Asumsi Dasar Ekonomi Makro 2019

APBN 2019 disusun secara seksama dan hati-hati dengan mempertimbangkan kondisi dinamika perekonomian global yang tengah bergerak menuju keseimbangan baru dan prospek perekonomian domestik ke depan. Beberapa asumsi dasar ekonomi makro APBN 2019 mengalami penyesuaian, yaitu:

Indikator	2019	
	RAPBN	APBN
a. Pertumbuhan ekonomi (% ,yoy)	5,3	5,3
b. Inflasi (% , yoy)	3,5	3,5
c. Tingkat bunga SPN 3 bulan (%)	5,3	5,3
d. Nilai tukar (Rp/US\$)	14.400	15.000
e. Harga Minyak Mentah Indonesia (US\$/barel)	70	70
f. Lifting Minyak (ribu barel per hari)	750	775
g. Lifting Gas (ribu barel setara minyak per hari)	1.250	1.250

Dalam RAPBN 2019, Pemerintah mengajukan asumsi nilai tukar sebesar Rp14.400/1USD, dan disepakati menjadi Rp14.500/1USD dalam Rapat Panja Asumsi. Berdasarkan perkembangan perekonomian terkini, serta dengan memperhatikan usulan Bank Indonesia terkait kisaran pergerakan rupiah tahun 2019 yang bergerak pada range Rp14.800 hingga Rp15.200 per dolar AS, maka dalam Rapat Kerja pembahasan dan penetapan Postur Sementara RUU APBN TA 2019, Pemerintah mengajukan usulan besaran rata-rata asumsi nilai tukar rupiah pada kisaran

Rp15.000/1USD. Usulan Pemerintah tersebut didasari oleh perkembangan terkini besaran nilai tukar rupiah serta sejalan dengan upaya Pemerintah untuk menyusun APBN yang realistis dan kredibel. Perubahan tersebut terutama dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi AS dengan normalisasi kebijakan moneter dan kebijakan fiskal ekspansif ditambah faktor risiko ketidakpastian global akan mendorong pergerakan arus modal kembali ke negara maju. Kondisi ini turut berdampak terhadap kinerja perekonomian domestik, khususnya kinerja nilai tukar rupiah. Akan tetapi, Pemerintah bersama Bank Indonesia akan terus melakukan kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah secara terukur sesuai fundamental ekonomi untuk memperkuat cadangan devisa guna memitigasi tekanan terhadap nilai tukar. Selain itu, beberapa faktor seperti fundamental ekonomi Indonesia yang kuat seiring terkendalinya laju inflasi serta defisit fiskal yang sehat diharapkan dapat berpengaruh positif terhadap kinerja nilai tukar.

Target asumsi lifting minyak dan gas tersebut didasarkan pada potensi produksi pada sumur-sumur migas yang ada disertai berbagai upaya untuk meningkatkan hasil produksinya baik melalui kegiatan kerja ulang, perawatan sumur, optimasi fasilitas produksi, maupun penerapan teknologi produksi yang tepat guna. Selanjutnya, Pemerintah juga terus berupaya mendorong kontraktor kontrak kerjasama (KKKS) untuk tetap melakukan kegiatan eksplorasi berkelanjutan baik eksplorasi migas konvensional maupun non-konvensional guna meningkatkan cadangan migas nasional.

Pokok-pokok APBN 2019

Pendapatan Negara

Target pendapatan negara di tahun 2019 merupakan target yang optimal namun tetap realistis untuk mendorong redistribusi pendapatan dan menjaga iklim investasi yang sehat.

- a. **Penerimaan perpajakan APBN 2019 ditargetkan sebesar Rp1.786,4 triliun** atau tumbuh 15,4 persen dari *outlook* APBN tahun 2018 dengan *tax ratio* dalam arti luas sekitar 12,2 persen.
 - ✓ **Kontribusi Penerimaan Perpajakan terhadap total pendapatan negara naik menjadi 82,5 persen.** Selain menjadi sumber utama penerimaan negara, pajak akan diarahkan untuk mendorong peningkatan iklim investasi dan daya saing.
 - ✓ **Target Penerimaan Kepabeanan dan Cukai tahun 2019 sebesar Rp208,8 triliun** atau tumbuh 5,7 persen dari *outlook* APBN tahun 2018, seiring perbaikan kinerja perdagangan dan meningkatnya harga komoditas.

Strategi dan kebijakan perpajakan tahun 2019 adalah dengan melakukan penggalan sumber pendapatan Negara dengan tetap mendukung iklim investasi dan daya saing ekspor, serta mendorong tingkat kepatuhan melalui reformasi perpajakan yang lebih sederhana dan transparan.

Di bidang Kepabeanan dan Cukai, pemerintah menerapkan berbagai kebijakan teknis antara lain berupa penyempurnaan penggunaan teknologi informasi, intensifikasi kebijakan tarif, kelancaran arus lalu lintas barang, administrasi dan organisasi pemungutan serta pemberantasan penyelundupan.

- b. **Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2019 ditargetkan Rp378,3 triliun** atau tumbuh 8,3 persen dari *outlook* APBN 2018, didorong adanya peningkatan kualitas dan volume layanan, perbaikan tata kelola, dan peningkatan kontribusi PNBP dari sumber daya alam. Kebijakan PNBP tahun 2019 diarahkan untuk mengoptimalkan sumber daya alam dan BMN diselaraskan dengan UU No. 9 Tahun 2018 tentang PNBP yang merupakan tonggak baru perbaikan tata kelola dan peningkatan akuntabilitas pengelolaan PNBP.

Belanja Pemerintah Pusat

- a. **Belanja Pemerintah Pusat dalam APBN 2019 sebesar Rp1.634,3 triliun** (meningkat Rp27,0 triliun dari usulan RAPBN 2019). Jumlah tersebut terdiri atas belanja Kementerian /Lembaga (K/L) sebesar Rp855,4 triliun dan belanja non K/L sebesar Rp778,9 triliun.
- b. **Alokasi belanja pemerintah pusat tahun 2019 tersebut dimanfaatkan untuk meningkatkan daya saing bangsa** melalui peningkatan kapasitas SDM, penguatan infrastruktur, peningkatan efektivitas program perlindungan sosial, pelaksanaan agenda demokrasi, penguatan birokrasi yang efisien dan efektif, serta antisipasi ketidakpastian termasuk mitigasi risiko bencana.
- c. **Untuk bidang pendidikan, Pemerintah konsisten untuk mengalokasikan anggaran pendidikan 20 persen dari APBN atau sebesar Rp492,5 triliun**, yang diarahkan untuk meningkatkan akses, distribusi, dan kualitas pendidikan. Beberapa perbaikan yang dilakukan antara lain pengalokasian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) berbasis kinerja dan afirmasi, percepatan pembangunan sarana prasarana sekolah dan universitas (sebagian dilaksanakan Kementerian PUPR; dan Dana Alokasi Khusus yang disupervisi Kementerian PUPR), pengalokasian dana abadi penelitian, serta penguatan pendidikan vokasi untuk meningkatkan *link and match* dengan kebutuhan industri.
- d. **Pemerintah juga menjaga pemenuhan anggaran kesehatan 5 persen dari APBN atau sebesar Rp123,1 triliun**, yang diarahkan untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan. Beberapa perbaikan yang dilakukan antara lain Perluasan Penerima Bantuan Iuran dalam rangka Jaminan Kesehatan Nasional (mencapai 96,8 juta jiwa pada 2019) diikuti peningkatan ketepatan sasaran, percepatan penanganan stunting pada 160 Kabupaten kota, dan melanjutkan optimalisasi bauran kebijakan pengendalian defisit BPJS kesehatan.
- e. **Pembangunan infrastruktur akan diperkuat dan diupayakan tuntas melalui terobosan pembiayaan kreatif, dengan alokasi diperkirakan mencapai Rp415,0 triliun**. Pengalokasian tersebut akan diikuti dengan perbaikan eksekusi proyek infrastruktur, peningkatan koordinasi lintas sektoral termasuk dengan Pemda, serta pemberdayaan BUMN dan swasta melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
- f. **Dalam APBN 2019 dilakukan juga perkuatan program perlindungan sosial kepada masyarakat miskin dan tidak mampu**. Hal ini didukung dengan alokasi anggaran Rp385 triliun, antara lain melalui program bantuan sosial, dana desa, subsidi, dan dukungan pengembangan UKM dan Koperasi.
- g. **Program perlindungan sosial bertujuan untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan 40 persen Penduduk dengan kondisi sosial ekonomi terendah**, seperti antara lain melalui Program Keluarga Harapan (PKH), Program Indonesia Pintar (PIP), perluasan Penerima Bantuan Iuran (PBI) pada program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), kredit ultra mikro, dan lain-lain.
- h. **Dalam APBN 2019, manfaat PKH yang diterima keluarga miskin meningkat dua kali lipat** dari Rp1,7 juta per keluarga menjadi Rp3,4 juta per keluarga per tahun. Dengan total anggaran yang meningkat dari Rp19,3 triliun menjadi Rp34,4 triliun.
- i. **Pada APBN 2019 akan dikembangkan skema transfer risiko bencana**, dengan melanjutkan asuransi pertanian dan asuransi nelayan serta melakukan *piloting* untuk asuransi barang milik Negara. Selain itu, untuk mengantisipasi kebutuhan dana bagi kegiatan tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi akibat bencana alam akan dibentuk *pooling fund* bencana yang bersumber dari APBN.

Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD)

- a. **Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp826,8 triliun atau meningkat Rp63,2 triliun** dari *outlook* APBN 2018. Pengalokasian TKDD tersebut diharmonisasikan dengan kebijakan belanja kementerian/lembaga, dan diarahkan untuk dikelola berdasarkan **prinsip *value for money*** untuk meningkatkan **kualitas pelayanan publik** di daerah, sekaligus **mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik** antardaerah.
- b. **Dana Alokasi Umum (DAU) bersifat final untuk memberikan kepastian sumber pendanaan bagi APBD.** Selanjutnya minimal 25 persen dari DAU sebagai bagian dari Dana Transfer Umum harus digunakan untuk belanja infrastruktur. Pengalokasian DAU telah memperhitungkan kenaikan gaji pokok 5 persen, gaji ke-13, Tunjangan Hari Raya (THR), serta Formasi CPNS Daerah.
- c. **Dalam DAU termasuk alokasi DAU tambahan untuk pendanaan kelurahan sebesar Rp3,0 triliun** yang ditujukan bagi 8.212 kelurahan di seluruh kabupaten/kota untuk pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat. Walaupun telah ada DAU tambahan tersebut, namun Pemda diminta untuk tetap mempunyai komitmen untuk mengalokasikan pendanaan bagi kelurahan dari sumber pendapatan lainnya dalam APBD, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan.
- d. **Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik fokus pada pembangunan SDM dan Infrastruktur,** terutama melalui percepatan rehabilitasi dan pembangunan ruang kelas (bidang pendidikan), pembangunan dan rehabilitasi rumah sarana kesehatan dan penyediaan Puskesmas keliling (bidang kesehatan), pembangunan/pemeliharaan/peningkatan jalan dan jembatan, penyediaan jaringan air minum, sarana air limbah dan sampah, pembangua/rehabilitasi irigasi, dan pembangunan perumahan (bidang infrastruktur dasar). Selain itu terdapat penambahan subbidang baru, yaitu GOR dan perpustakaan daerah. Pengalokasian DAK Fisik berdasarkan usulan kebutuhan daerah dan prioritas pembangunan nasional.
- e. **DAK Non Fisik untuk perbaikan kualitas kinerja,** terutama melalui BOS berbasis kinerja dan peningkatan *unit cost* BOS untuk Pendidikan Vokasi. Penambahan jenis DAK Nonfisik baru, yaitu bantuan operasional pendidikan (BOP) untuk kesetaraan, BOP untuk museum dan taman budaya, Dana Pelayanan Kepariwisataaan, dan Dana Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah (BLPS).
- f. **Dana Desa dioptimalkan pemanfaatannya** untuk meningkatkan penyediaan infrastruktur desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, dan mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa, sesuai kebutuhan dan prioritas desa, melalui penyempurnaan pola padat karya tunai (*cash for work*), penyaluran berdasarkan kinerja pelaksanaan, penguatan kapasitas SDM desa dan tenaga pendamping desa, dan penguatan *monitoring*, evaluasi dan pengawasan.

Defisit APBN 2019

- a. **APBN 2019 tetap bersifat ekspansif dengan defisit ditetapkan sebesar Rp296,0 triliun atau 1,84 persen terhadap PDB.** Defisit ini lebih rendah dari *outlook* 2018 sebesar 2,12 persen terhadap PDB atau sebesar Rp314,2 triliun. Defisit yang dijaga lebih rendah ini bertujuan untuk menjaga ketahanan fiskal, disertai dengan rencana penarikan utang yang semakin menurun dan secara terukur, dan dikelola secara transparan, akuntabel, serta sesuai standar internasional.
- b. **Upaya menjaga keberlanjutan fiskal juga terlihat dari defisit keseimbangan primer** yang mencapai Rp20,1 triliun, yang jauh lebih rendah dibandingkan *outlook* APBN 2018. Defisit

keseimbangan primer yang konsisten turun menuju positif ini memberikan bukti kuat sekaligus sinyal positif bahwa pengelolaan APBN selama ini telah berada pada jalur yang tepat.

- c. **Rasio defisit APBN dan defisit keseimbangan primer** ini yang terendah sejak tahun 2013.

Pembiayaan Anggaran

Untuk menutup defisit APBN 2019, **pembiayaan anggaran ditetapkan sebesar Rp296,0 triliun atau turun 5,8 persen** dari *outlook* APBN tahun 2018. Pembiayaan anggaran berasal dari pembiayaan utang baik berupa Surat Berharga Negara (SBN) Konvensional dan **Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)**. **Pembiayaan utang tersebut tumbuh negatif sebesar minus 7,3 persen dari *outlook* APBN tahun 2018**. Selain itu pembiayaan anggaran juga untuk kegiatan investasi. Pembiayaan Investasi tahun 2019 ditujukan untuk meningkatkan **kualitas pendidikan, infrastruktur, dan daya saing ekspor serta peran Indonesia di dunia internasional**.

Pembiayaan melalui utang hanya merupakan instrumen fiskal untuk menuju tujuan pembangunan yang menjadi cita-cita bangsa. Pembiayaan utang tahun 2019 menurun dari tahun-tahun sebelumnya dan bahkan menjadi yang terendah dari 5 (lima) tahun terakhir, hal ini mencerminkan APBN yang semakin sehat dan mandiri.

Lampiran Keterangan Pers

Nomor : 54 /KLI/2018

Tanggal : 31 Oktober 2018

Postur Ringkas APBN 2019

Uraian (triliun Rupiah)	2018	2019		
	Outlook APBN	RAPBN	APBN	Selisih
A. PENDAPATAN NEGARA	1.903,0	2.142,5	2.165,1	22,6
I. PENDAPATAN DALAM NEGERI	1.897,6	2.142,1	2.164,7	22,6
1. PENERIMAAN PERPAJAKAN	1.548,5	1.781,0	1.786,4	5,4
<i>Tax Ratio (%)</i>	<i>11,57</i>	<i>12,11</i>	<i>12,22</i>	
2. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	349,2	361,1	378,3	17,2
II. PENERIMAAN HIBAH	5,4	0,4	0,4	0,0
B. BELANJA NEGARA	2.217,3	2.439,7	2.461,1	21,4
I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT	1.453,6	1.607,3	1.634,3	27,0
1. Belanja K/L	813,5	840,3	855,4	15,2
2. Belanja Non K/L	640,2	767,1	778,9	11,8
II. TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA	763,6	832,3	826,8	(5,6)
1. Transfer ke Daerah	703,6	759,3	756,8	(2,6)
2. Dana Desa	60,0	73,0	70,0	(3,0)
C. KESEIMBANGAN PRIMER	(64,8)	(21,7)	(20,1)	1,6
D. SURPLUS/ (DEFISIT) ANGGARAN (A - B)	(314,2)	(297,2)	(296,0)	1,2
<i>% Surplus/ (Defisit) Anggaran terhadap PDB</i>	<i>(2,12)</i>	<i>(1,84)</i>	<i>(1,84)</i>	
E. PEMBIAYAAN ANGGARAN	314,2	297,2	296,0	(1,2)
I. PEMBIAYAAN UTANG	387,4	359,3	359,3	(0,0)
II. PEMBIAYAAN INVESTASI	(65,7)	(74,8)	(75,9)	(1,1)
III. PEMBERIAN PINJAMAN	(6,5)	(2,3)	(2,4)	(0,1)
IV. KEWAJIBAN PENJAMINAN	(1,1)	0,0	0,0	0,0
V. PEMBIAYAAN LAINNYA	0,2	15,0	15,0	0,0